

## BAB II

### SISTEM PEMERINTAHAN DAN POLITIK PERANCIS

Sebelum memasuki tahap analisa yang lebih komprehensif tentang kemenangan Emmanuel Macron pada Pemilihan Presiden Perancis tahun 2017, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang sistem pemerintahan dan politik Perancis sebagai negara yang pada saat itu sedang menentukan kepala pemerintahannya secara demokratis. Pemaparan berikut dapat digunakan sebagai bahan informasi pendukung terkait berjalannya proses kampanye sebelum Pemilihan Presiden Perancis berlangsung, yang terdiri dari beberapa sub-bab yakni sistem pemerintahan nasional Perancis, sistem pemilihan di Perancis, dan sistem kepartaian di Perancis.

**Gambar 2.1: Peta Negara Perancis**



*Sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/delapan-orang-ditembak-dekat-masjid-di-perancis/3925874.html>*

Perancis, merupakan variabel penelitian yang memiliki latar belakang sejarah menarik. Berdasarkan pada data yang penulis peroleh dari Website Resmi Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris,<sup>24</sup> Perancis pernah berperan dalam memelopori integrasi Eropa sebagai sebuah benua yang dibangun kembali setelah kehancuran akibat Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1990 kerjasama Franco-Jerman memiliki pengaruh yang penting bagi integrasi ekonomi Eropa. Ikatan antara kedua negara kembali menguat di millennium baru ketika kedua pimpinan negara menyoalakan oposisi kuat terhadap kegiatan Amerika Serikat di Iraq dimulai. Namun Perancis mengejutkan Uni Eropa ketika para pemberi suaranya menolak konstitusi UE pada referendum di bulan Mei 2005. Kegiatan kolonial Perancis di masa lalu menjadikan Perancis sebagai negara dengan populasi multikultural. Perancis merupakan rumah bagi lebih dari 5 juta keturunan Arab dan Afrika.

Perancis memiliki sejumlah *overseasterritory* yang jika digabungkan dengan daratan utama Perancis dan Korsika, menjadikan negara ini memiliki 26 wilayah. Wilayah-wilayah tersebut kemudian dibagi kedalam 100 departemen, empat diantaranya adalah French Guiana, Guadeloupe, Martinique dan Réunion-yang secara geografis terletak jauh dari kawasan Eropa. Pemerintah Perancis dikenal dengan tingkat sentralisasinya yang tinggi, namun pada Maret 2003 parlemen menyetujui amandemen konstitusi yang mengizinkan desentralisasi kekuasaan yang cukup besar bagi masing-masing wilayah dan departemen. Pada saat pemilihan berlangsung perubahan tersebut dilihat sebagai proposal baru untuk menggabungkan kembali proses politik masyarakat Perancis yang kecewa terhadap pengaruh yang seringkali diajukan oleh masyarakat elit Perancis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Beranda Website Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Perancis. Diakses 24 Desember 2017 (Dapat diakses pada: <https://www.kemlu.go.id/paris/id/Pages/Perancis.aspx>)

<sup>25</sup>*ibid.*

## A. Sistem Pemerintahan Perancis

Untuk mengenal lebih dalam sistem pemerintahan Perancis, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keberadaan pemerintahan lokal di perancis. Sebagaimana yang penulis kutip dari buku “Pemerintahan Politik Lokal Jerman dan Perancis” yang ditulis oleh Eko Prasajo, dijelaskan bahwa sejarah awal keberadaan pemerintahan lokal di Perancis ditandai dengan adanya “*la paroisse*” atau “*parish*”, yaitu sejumlah anggota masyarakat di dalam kesatuan wilayah yang memiliki perangkat kehidupan bersama dalam bidang pertanian. Sejak abad ke 11 dan 12, kota-kota di Perancis menuntut otonomi dari para penguasa tanah. Beberapa nama pemerintahan lokal di Perancis yang sampai sekarang dipergunakan antara lain “*Villefranche*”, “*Neuville*”, atau “*Bourg*”. Istilah yang terakhir “*Bourg*” yang berarti Borjuis mencerminkan posisi kekuatan yang diperoleh oleh masyarakat melalui perdagangan dan hasil-hasil produksi lainnya.

Pada masa itu, kekuasaan pusat yang direpresentasikan oleh raja berfungsi sebagai hakim atau penengah dalam konflik lokal serta memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk membentuk pemerintahan lokal yang bebas dari kekuasaan kelompok pemilik tanah. Setelah perang ratusan tahun dengan Inggris (1137-1453), terjadi sentralisasi kekuasaan raja yang menyebabkan berkurangnya kekuasaan pada penguasa tanah dan juga pemerintahan lokal. Esensi otonomi lokal kota-kota pada masa itu perlahan-lahan semakin berkurang dan mencapai klimaksnya pada abad pertengahan dimana absolutisme menghendaki sentralisasi kekuasaan penuh dan menghilangkan hak-hak otonomi lokal. Puncak monarki absolutisme terjadi pada masa Ludwig XIV dengan kebijakan politik merkantilisme.

Pada awal abad ke 17, otonomi lokal di kota kembali mengalami perluasan dengan menguatnya paham individualisme dan *citizenship*. Meskipun demikian,

kekuasaan pusat yang dicerminkan dan direpresentasikan oleh raja membatasi otonomi lokal melalui wakil-wakil pemerintah yang ditempatkan di tingkat lokal. Kewenangan wakil-wakil pemerintah meliputi mulai dari pemungutan pajak, urusan keamanan/kepolisian, pengawasan terhadap pemerintahan lokal sampai pada kewenangan peradilan. Untuk menghindari gerakan perlawanan dan separatisme, para wakil rakyat tersebut melakukan pengawasan yang ketat serta mencabut hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun kekuasaan pusat sangatlah besar, tetapi masih tersisa otonomi dalam bentuk urusan-urusan yang secara tradisional ada di tingkat lokal, seperti penyediaan air dan urusan budaya. Akan tetapi, absolutisme telah menyebabkan berkurangnya kemampuan pemerintahan kota untuk menyediakan pelayanan publik. Dalam sejarah perkembangan otonomi lokal di Perancis pada masa antik sampai abad 17, dapat dinyatakan bahwa bentuk otonomi dan ukuran wilayah pemerintahan lokal tidaklah bersifat homogen.<sup>26</sup>

Revolusi Perancis tahun 1789 memainkan peranan yang sangat penting bagi masa depan sistem pemerintahan lokal di Perancis. Struktur administrasi dan negara yang sangat sentralistik ternyata tidak saja menciptakan inefisiensi pemerintahan, tetapi juga rendahnya partisipasi masyarakat. Tuntutan untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan lokal didorong oleh Revolusi Perancis, melahirkan susunan baru pemerintahan lokal di Perancis pada Desember 1789. Bentuk lama pemerintahan lokal “*paroisses*” diganti dengan 38.500 “*communes*”. Sebanyak 83 “*departements*” yang merupakan unit kesatuan administrasi baru dibentuk dan membawahi tiga unit pemerintahan lokal lainnya, yaitu membawahi “*arrondissements*”, “*cantons*”, dan “*communes*”.

---

<sup>26</sup> Prasajo, Eko. 2009. *Pemerintahan Politik Lokal di Jerman dan Perancis*. Jakarta: Salemba Humanika.

Di dalam struktur pemerintahan *communes* dibentuk dua organ yaitu “conseil” sebagai dewan perwakilan rakyat dan “maire” sebagai eksekutif. Conseil dipilih secara langsung oleh masyarakat pemilih yang terdaftar dan membayar pajak (*citoyon actif*), sedangkan maire dipilih di antara anggota conseil. Di dalam struktur pemerintahan departemens dibentuk juga conseil general (dewan) dan *procureur* (eksekutif). Di bawah struktur departemens dibentuk *arrondissements* yang berfungsi sebagai wilayah administrasi departemens. Meskipun departemens memiliki kewenangan yang besar, tetapi tidak berhak memungut dan mendistribusikan pajak tersebut, kewenangan ini tetap berada pada badan legislatif di pusat. Pada sisi lainnya, *communes* juga memiliki kewenangan.

Reformasi pemerintahan lokal di Perancis mencapai puncaknya pada pemerintahan Presiden Mitterand tahun 1982 dan berlaku sampai saat ini. Reformasi pemerintahan lokal tersebut termaktub dalam UU tahun 1982 tentang hak dan kebebasan *communes*, departemens, dan region. Berdasarkan UU tersebut, struktur pemerintahan lokal tidak berubah, dewan perwakilan rakyat (*conseil*) memiliki kewenangan yang luas serta hubungan antara pusat dan lokal mengalami perubahan. Tujuan dari reformasi pemerintahan lokal adalah memperkuat otonomi *communes*, departemens, dan region untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan kebutuhannya. Sesuai dengan tujuan tersebut, *prefet* sebagai kepala organisasi *tuttele* dan wakil pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan eksekutif pada tingkat departemens dan region.

Di Perancis, kewenangan pemerintahan subnasional sangatlah terbatas dan merupakan residu dari kewenangan-kewenangan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Pengaruh politik pemerintah pusat terhadap pemerintah lokal terjadi pada semua urusan, yang menjadikan pemerintahan lokal sebagai instrumen implementasi politik pemerintah. Hubungan antara pusat

dan peripheri adalah suatu hubungan yang berdasarkan norma dan kontrol yang terlembaga pusat terhadap pemerintahan lokal.

Corak pemerintahan yang sentralistik tersebut sebenarnya berasal dari konstitusi Republik Pertama tahun 1884, dengan berbagai macam perubahan dan modifikasi pada republik berikutnya sampai dengan tahun 1982. Sesuai dengan semangat konstitusi 1884, Perancis adalah negara kesatuan yang terdesentralisasi secara administrasi dalam tingkatan-tingkatan pemerintahan loka. Reformasi pemerintahan lokal yang terjadi sejak tahun 1982 pada prinsipnya lebih menekankan dekosentrasi administrasi.

Sejak reformasi tahun 1982, struktur pemerintahan di Perancis secara legal formal terdiri atas empat tingkatan, yaitu Etat (pemerintah pusat), region, departements, dan communes. Pemerintah pusat terdiri atas presiden dan perdana menteri, dimana presiden membawahi perdana menteri dan keseluruhan kementerian. Sedangkan perdana menteri melakukan koordinasi terhadap seluruh pelaksanaan kementerian sektor, baik di tingkat nasional maupun pemerintahan lokal (*secretariat general du gouvernement*). Secara khusus, untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, *secretariat general du gouvernement* membawahi pula secara berjenjang komisaris pemerintahan region (*commissaire de la Republique de region*) dan komisaris pemerintahan departements (*commissaire de la Repunlique du departements*). Sedangkan pada masing-masing tingkat pemerintahan lokal, dibentuk pula kantor wilayah departemen sektor dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dekosentrasi.

Struktur hubungan antara pemerintah pusat, region, departements, dan communes di Perancis menggambarkan corak pemerintahan yang sentralistik. Di region, departements, dan communes sebagai daerah otonom, terdapat pula organ-organ administrasi lapangan sektoral dalam rangka penyelenggaraan asas dekosentrasi

dan organ-organ pusat dalam rangka penyelenggaraan tugas administrasi umum.<sup>27</sup>

## **B. Sistem Pemilihan Umum Perancis**

Menurut Jimly Asshidiqie dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta, 2012), apabila disederhanakan, sistem pemeritahan yang dikenal di dunia dewasa ini dapat dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Swiss. Amerika Serikat menganut sistem presidensiil. Hampir semua negara di Benua Amerika, kecuali beberapa seperti Kanada, meniru Amerika Serikat dalam hal ini.

Di benua Eropa dan kebanyakan Negara Asia pada umumnya menggunakan model Inggris, yaitu sistem parlementer. Akan tetapi, Perancis memiliki model tersendiri yang bersifat campuran atau yang biasa disebut dengan *hybrid system*. Pada umumnya Negara-negara bekas jajahan Perancis di afrika menganut sistem pemerintahan campuran itu. Di satu segi ada perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tetapi Kepala Negaranya adalah Presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung seperti dalam sistem presidensiil. Adapun kepala pemerintahan di satu segi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi disegi lain ia diangkat karena kedudukannya sebagai pemenang pemilu yang menduduki kursi parlemen, dan karena itu ia juga bertanggung jawab kepada parlemen.<sup>28</sup>

Lembaga eksekutif di Perancis memiliki dua pemimpin: Presiden Republik yang merupakan Kepala Negara dipilih langsung oleh rakyat untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintahan dipimpin

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup> Novianti, Cora Elly. 2013. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. Jakarta: Neliti. (Dapat diakses pada: <https://media.neliti.com/media/publications/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan.pdf>)

oleh Perdana Menteri yang ditunjuk Presiden. Cabang kekuasaan legislatif di Perancis menggunakan sistem parlemen 2 pintu (bikameral) yang terdiri dari Majelis Nasional (*Assemblée Nationale*) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama 5 tahun. Majelis Nasional memiliki kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban kepada perdana menteri dan kabinetnya serta dapat menjatuhkannya melalui mosi, tetapi sebaliknya majelis nasional dapat dibubarkan oleh Presiden tetapi parlemen tidak dapat memecat Presiden.<sup>29</sup>

Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan 6 tahun (Senat dipilih dengan sistem tidak langsung dengan electoral college di mana anggotanya dipilih oleh anggota Dewan Nasional, Departement, Region and Commune). Selain itu, Presiden bersama dengan Majelis Nasional dan Senat akan mengangkat Dewan Konstitusi yang anggotanya terdiri dari 10 orang yang salah satu tugas utamanya adalah mengurus Pemilu.<sup>30</sup>

Proses Pemilu di Perancis dilakukan oleh Dewan Konstitusi (*Conseil constitutionnel*) yang merupakan Kewenangan konstitusional tertinggi di Perancis yang didirikan oleh Konstitusi Republik Kelima pada tanggal 4 Oktober 1958. Pilpres diadakan setiap 5 tahun sekali sejak disahkannya *loi constitutionnelle 2000-964 du 2 Octobre 2000*. Kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu, Dewan Konstitusi bertugas melakukan pengawasan dan ketertiban Pemilu, baik Presiden dan parlemen dan memastikan pelaksanaan referendum (Ayat 58, 59 dan 60), mengeluarkan hasil resmi Pemilu, memastikan perilaku yang tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan, dan mengontrol jalannya pelaksanaan aturan kampanye.

---

<sup>29</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI). 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. Jakarta: CV. Net Communication.

<sup>30</sup> DKPP RI. *Ibid*.



Dewan Konstitusi adalah otoritas tertinggi dalam Pemilu. Dewan Konstitusi terdiri dari mantan Presiden yang telah memilih untuk duduk di dewan (yang mana mereka tidak lagi terlibat langsung dalam politik), dan sembilan anggota lain, sepertiga di antaranya diangkat setiap tiga tahun, tiga masing-masing ditunjuk oleh Presiden Republik, Presiden Majelis Nasional, dan Presiden Senat. Presiden Dewan dipilih oleh Presiden Republik. Dewan konstitusi memiliki Kewenangan yang besar bahkan dapat menyatakan Pemilu tidak sah jika dilakukan secara tidak benar, atau dapat membatalkan hasil jika calon terpilih menggunakan cara-cara ilegal, atau jika mereka menghabiskan dana kampanye di luar ketentuan hukum.

Di Perancis, terdapat dua pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, yaitu pemilihan umum eksekutif untuk memilih Presiden, dan pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota *Assemblée Nationale* dengan masa jabatan masing-masing selama lima tahun. Baik Presiden maupun anggota *Assemblée Nationale* dipilih secara langsung oleh warga Negara Perancis. Pemilu eksekutif dilaksanakan lebih dahulu sebelum dilaksanakannya Pemilu legislatif. Karena Pemilu eksekutif dilaksanakan terlebih dahulu, secara otomatis Presiden terpilih lebih dahulu dibandingkan dengan anggota *Assemblée Nationale*. Karena masyarakat sudah melihat aliran mana yang dianut oleh Presiden terpilih, biasanya mayoritas pemenang Pemilu legislatif berasal dari aliran yang sama dengan Presiden. Presiden kemudian memilih Perdana Menteri yang berasal dari aliran mayoritas pemenang Pemilu legislatif atau anggota *Assemblée Nationale* terpilih. Setelah itu Presiden dan Perdana Menteri bersama-sama membentuk kabinet.<sup>31</sup>

Sistem pemilihan umum yang digunakan di Perancis dikenal dengan istilah *scrutin majoritaire*. *Scrutin*

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

majoritaire adalah suatu sistem Pemilu di mana seorang pemenang dari Pemilu tersebut ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini dapat dibagi lagi menjadi dua mekanisme pelaksanaan; satu putaran (single tour) dan dua putaran (à deux tours). Namun, Perancis tidak pernah memakai mekanisme Pemilu satu putaran. Perancis memakai mekanisme Pemilu dua putaran di setiap Pemilu yang diadakannya.<sup>32</sup> Sistem pemilihan dua putaran yang diaplikasikan ini, diperkenalkan pada 1962 oleh Charles de Gaulle. Sistem ini terbukti efektif membendung kelompok ekstrem berkuasa.<sup>33</sup>

Bukan hanya mekanisme Pemilu yang dilaksanakan satu atau dua putaran tetapi model kertas suara dapat memperlihatkan sistem Pemilu yang digunakan. Terdapat dua model kertas suara; uninominal dan plurinominal. Surat suara uninominal (nama tunggal) jika hanya ada satu kursi yang harus terisi per konstituensi. Jadi, kita memilih langsung kandidatnya. Sedangkan, surat suara plurinominal berbentuk seperti daftar. Hal ini jika terdapat lebih dari satu kursi yang harus diisi per konstituensi.<sup>34</sup>

Dari sistem ini semua, nama sistem dalam suatu Pemilu dapat dibentuk. Pemilu presiden, anggota Assemblée Nationale, tingkat département dan region memiliki sistem yang dinamakan scrutin uninominal majoritaire à deux tours dan untuk Pemilu di tingkat commune memiliki sistem dengan nama scrutin plurinominal a deux tour. Dalam hal kampanye, Kandidat diharuskan mempunyai akun untuk kampanye yang telah diaudit oleh CCEP (National Committee on Campaign Account and Politic Financing). Akun untuk kampanye

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Kertopati, Lesthia. 2017. *Mengintip Proses Pemilu Presiden Perancis*. CNN Indonesia. Diakses 31 Desember 2017. (Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170506004245-134-212736/mengintip-proses-pemilu-presiden-perancis>)

<sup>34</sup> DKPP RI. *Op. Cit.*, Hlm. 113.

harus ditetapkan dan harus diserahkan dalam waktu dua bulan setelah Pemilu.

Pada awalnya, hanya Dewan Konstitusi diberi wewenang untuk memverifikasi kebenaran tersebut tapi karena hukum organik dari 5 April 2006, CCEP ( National Committee on Campaign Account and Politic Financing) melakukan pengecekan ini. Seperti halnya Pemilu di Indonesia, Pemilu di Perancis juga menggunakan cara manual dalam Pemilunya. Mereka datang ke TPS, memilih, dan menandatangani buku absen pemilih sebagai bukti kalau mereka telah memilih.<sup>35</sup>

### **C. Sistem Keptaian di Perancis**

Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dengan atribut “politik” berarti pengelompokan yang bergerak di bidang politik.<sup>36</sup>

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan

---

<sup>35</sup> DKPP RI. *Ibid.*

<sup>36</sup> Safa’at, Muchammad Ali., Ekatjahjana, Widodo., Fatmawati., Saifuddin., Amsari, Feri. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (dapat diakses pada: <http://harupermedi.lecture.ub.ac.id/2014/06/buku-hukum-acara-mk-bahan/>)

kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.<sup>37</sup>

Perancis merupakan negara yang menganut sistem multi partai. Namun secara garis besar, peta politik Perancis dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu partai atau kelompok politik beraliran kiri (*gauche*) dan kanan (*droite*). Partai-partai yang beraliran kiri berisikan partai-partai yang menganut dan mengadopsi nilai-nilai sosialisme dan demokrasi sosial. Sedangkan partai-partai yang ada di aliran kanan lebih bersifat konservatif, liberal dan kadang berisikan kelompok-kelompok kanan agama seperti partai Popular Republican Movement yang beraliran Christian Democratic.

Ideologi Konservatif yang kebanyakan dimiliki oleh kelompok kanan kurang lebihnya merupakan ideologi yang berusaha mempertahankan sistem dan tatanan sosial yang sudah ada dan tidak menghendaki perubahan yang radikal. Kelompok-kelompok konservatif akan berusaha mempertahankan tradisi dari sebuah negara untuk tidak hilang atau pudar seiring dengan hadirnya tradisi-tradisi baru yang berkembang atau dibawa oleh para pendatang. Ideologi ini pula yang menjadi salah satu dasar dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai-partai dari kelompok kanan. Berdasarkan ideologi yang dianut oleh kelompok kanan Perancis, hingga saat ini partai-partai dari kelompok kanan terkenal dengan kebijakan mereka yang vokal mengenai kebijakan anti imigran. Contoh kebijakan yang mencerminkan ideologi kanan sangat terlihat pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan Nicholas Sarkozy di mana keduanya mengeluarkan

---

<sup>37</sup> Safa'at. *Ibid.*

kebijakan yang dapat dikatakan bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.<sup>38</sup>

Kepartaian Perancis yang bersifat multipartai ini mengakibatkan munculnya persaingan politik yang beragam, sedikitnya ada 20 partai politik di Perancis. Beberapa diantaranya merupakan partai besar, seperti Partai Sosialis dan Partai Union for a Popular Movement. Kedua contoh partai ini pada hampir setiap pemilihan umum mampu menduduki kursi popularitas yang tinggi dan memperoleh suara terbanyak pemilihan umum di Perancis. Partai politik terbagi dalam posisi-posisi sesuai dengan misi yang mereka usung. Partai sosialis mengusung nilai-nilai sosialis dalam pemahaman dan ideologi partainya. Partai politik Perancis terbagi kedalam beberapa aliran, *Left-Wings*, *Right-Wings*, *Greens*, *Centrists*, *Former Parties of Note*, dan *Far-right*.<sup>39</sup>

Kemudian pada tahun 2016 berdiri sebuah partai aliran tengah, dan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, pada Pemilihan Presiden tahun 2017, presiden terpilih bukan berasal dari dua partai utama, Sosialis dan Republik. Macron, Presiden terpilih Perancis, mendirikan partai En Marche untuk menyatukan aliran kiri dan kanan dengan visi pro-Eropa, pro-integrasi, dan pro keterbukaan. Macron berhasil mengalahkan saingannya Marine Le Pen yang ekstremis kanan, anti-Eropa, dan anti-imigran.<sup>40</sup> Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya terkait profil Emmanuel Macron.

---

<sup>38</sup> Afriani, Christie. 2013. *Konstitusi Perancis dan Larangan Penggunaan Burqa oleh Nicolas Sarkozy*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

<sup>39</sup> Yuniarti, Ervina. 2011. *Pengaruh Feminisme terhadap Parity Law dalam Parlemen Perancis*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (Dapat diakses pada: <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1687>)

<sup>40</sup> Pujayanti, Adirini. 2017. *Terpilihnya Macron sebagai Presiden dan Hubungan Bilateral Indonesia-Perancis*. Majalah INFOSingkat Hubungan Internasional Vol. XI, No. 10/II/Puslit/Mei/2017. Jakarta: Badan Keahlian DPR RI.